

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian yang menjadi titik tolak penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian asumsi dan hipotesis penelitian.

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Kurt Lewin mengatakan manusia dan lingkungannya merupakan bagian-bagian dari ruang kehidupan (*life space*) yang saling tergantung satu sama lain (Alwisol, 2009).

Dalam kenyataannya, lingkungan fisik maupun sosio-psikologis akan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut mencakup berbagai sektor kehidupan. Penduduk dunia semakin bertambah dari tahun ke tahun, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang pesat, sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia semakin terkuras, pertemuan antara penduduk asli dan pendatang yang memiliki karakteristik dan budaya berbeda tidak dihindarkan.

Menurut Maftuh (2004) perubahan sosial ini kadang menimbulkan konflik bagi individu maupun masyarakat. Konflik sebenarnya adalah salah satu aspek

interaksi sosial manusia dan ia secara alamiah terjadi dalam kehidupan sosial. Namun dalam menghadapi konflik seseorang atau suatu masyarakat dapat mengambil sikap penyelesaian yang berbeda, sebagian mengambil sikap konstruktif dan sebagian lainnya bersikap destruktif.

Konflik yang terjadi di Maluku sejak tahun 1999, memunculkan sejumlah masalah yang cukup pelik baik itu dalam hubungan antar agama, etnis maupun negeri (daerah). Seperti masalah segregasi sosial, baik menyangkut segregasi pemukiman maupun polarisasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga masalah stigma-kolektif, misalnya Islam identik dengan teroris dan Kristen identik dengan separatis (Pariela, 2009). Lebih lanjut Pariela mengatakan kondisi segregasi masyarakat di Maluku berdasarkan garis agama sesungguhnya bukan fenomena yang baru. Pemerintah kolonial memberikan kontribusi cukup signifikan untuk melahirkan kondisi segregasi agama, untuk mempermudah kontrol mereka terhadap masyarakat jajahan. Sejak dahulu dengan sangat mudah kita dapat mengidentifikasi wilayah geografis desa-desa Islam maupun Kristen di Maluku. Dalam perkembangan kemudian kondisi segregasi tersebut cenderung mencair, terutama pada masyarakat di pusat-pusat wilayah pemerintahan dan ekonomi. Proses de-segregasi sosial kemudian hancur total bersamaan dengan konflik sosial Maluku yang terpicu pada masalah agama, antara Islam dan Kristen.

Kondisi segregasi maupun stigma yang berkembang ini akan menjadi lahan yang subur untuk memunculkan konflik-konflik baru, seperti yang terjadi 19 September 2011 konflik kembali terjadi di kota Ambon yang dikarenakan kematian

seorang tukang ojek yang beragama Islam di daerah komunitas Kristen (<http://www.metronews.com>, 11 September 2011). Tanggal 15 Mei 2012, konflik kembali terjadi di kota Ambon, bertepatan dengan hari Pattimura salah satu pahlawan nasional. Akibat bentrokan ini mengakibatkan 55 orang terluka, 3 rumah dan 10 motor hangus terbakar (<http://news.viva.co.id>, 15 Mei 2012).

Dilihat dari perspektif pendidikan dan perkembangan manusia, konflik sosial merupakan peristiwa kehidupan yang berpengaruh terhadap perkembangan mental dan psikososial bagi individu yang mengalaminya. Dalam jangka panjang peristiwa-peristiwa konflik tersebut dapat mengakibatkan trauma yang mempersulit penyesuaian diri serta mengganggu perkembangan sosialnya, baik yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan maupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kaitan dengan kehidupan secara luas.

Schneiders (1960) menjelaskan penyesuaian diri sebagai suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan individu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, frustrasi dan konflik secara sukses serta menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau tuntutan lingkungan dimana dia hidup. Penyesuaian diri timbul apabila terdapat kebutuhan, dorongan, dan keinginan yang harus dipenuhi oleh seseorang, termasuk juga saat seseorang menghadapi suatu masalah atau konflik yang harus diselesaikan. Individu pada kondisi ini akan mengalami proses belajar, belajar memahami, mengerti dan berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya maupun lingkungannya.

Salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian diri adalah lingkungan masyarakat. Ali & Asrori (2009) menyatakan konsistensi nilai-nilai, sikap-sikap, aturan-aturan, norma, moral dan perilaku masyarakat akan diidentifikasi oleh individu yang berada dalam masyarakat tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap proses perkembangan penyesuaian dirinya. Tidak sedikit kecenderungan penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri yang tidak baik, berasal dari pengaruh lingkungan masyarakatnya.

Fenomena di lapangan menunjukkan perilaku masyarakat dengan menyelesaikan konflik secara kekerasan sebagai salah satu respon dari penyesuaian diri yang buruk telah memberi pengaruh pada perilaku para peserta didik di kota Ambon. Dari tahun 2011 sampai 2012 tercatat beberapa peristiwa perkelahian yang melibatkan siswa/pelajar. Seperti yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2011, dua kelompok mahasiswa Universitas Pattimura Ambon saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan membakar sejumlah fasilitas kampus diantaranya gedung registrasi, laboratorium MIPA, dan Fakultas Ekonomi. Konflik ini ditengarai karena protes hasil Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri yang dinilai tidak berimbang antara Mahasiswa Kristen dan Islam (<http://www.metrotvnews.com>, 6 Juli 2011).

Tanggal 21 Maret 2012, tawuran antar pelajar terjadi di Terminal Mardika yang melibatkan pelajar berseragam SMA dan SMP dan melibatkan sejumlah orang yang berpakaian preman (Redaksi Moluken, 21 Maret 2012). Pada tanggal 16 September 2012, perkelahian yang melibatkan sejumlah pelajar dari enam sekolah

berbeda yakni SMKN 4 Ambon, SMKN 7 Ambon, SMA Negeri 2 Ambon, SMA Negeri 13 Ambon, SMKN 1 Ambon dan SMP Negeri 11 Ambon, konflik diduga karena persoalan dendam lama kepada kakak kelas (Harian Radar Ambon, 17 September 2012). Awal November 2012 perkelahian sejumlah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kembali terjadi di kawasan Pattimura Park mengakibatkan seorang remaja berusia 18 tahun mengalami luka (<http://www.kompas.com>, 6 November 2012).

Ketidakmampuan menyesuaikan diri yang ditunjukkan dengan konflik dikalangan pelajar tidak terlepas juga dari aspek perkembangan mereka. Secara kronologis pelajar atau siswa berada pada masa *adolesensi* yang merupakan tahapan perkembangan sekitar usia 12 tahun dan berakhir sekitar 20 tahun, yang ditandai oleh perubahan fisik, kognitif dan sosial (Hurlock, 1980). Masa remaja yang merupakan masa peralihan menuju ke masa dewasa ini rentan akan perubahan. Pada masa ini remaja mengalami krisis identitas atau belum mencapai identitas dan masih dalam proses pencarian identitas, sehingga dalam masa pencarian identitas diri ini, remaja cenderung mengalami kebingungan. Akibat dari krisis identitas ini, menurut Erickson berpotensi untuk berbagai bentuk problem perilaku yang malasuai, seperti depresi, kenakalan ataupun tindakan agresif lainnya (Alwisol, 2009).

Temuan di lapangan pada salah satu SMP Negeri di kota Ambon memperlihatkan terdapat kelompok-kelompok atau *geng* yang dibentuk di kalangan peserta didik yang kerap kali terlibat perkelahian, seperti kelompok Brakomda (berani kore mandi darah),

Brakoca (brani kore pica), Malboro (masuk lorong borong), *young community calabor* (komunitas pemuda urakan).

Konflik kekerasan yang melibatkan para siswa ini menuntut sekolah mengambil tanggung jawab untuk menyediakan program pendidikan dalam membantu para siswa ini memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan baik sehingga pada saat menyelesaikan permasalahannya tidak menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma dimana dia hidup.

Maftuh (2004) menjelaskan para siswa mesti dididik dan dilatih dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap serta ketrampilan untuk memecahkan konflik / masalahnya secara positif. Pernyataan ini sejalan dengan salah satu pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh UNESCO yaitu *Learning to Live Together*. Dalam *Learning to live together* peserta didik melalui proses pendidikan dididik untuk belajar hidup berdampingan secara damai, dengan memberikan rasa hormat dan perhatian pada orang lain, belajar tentang penerimaan, toleransi dari perbedaan, baik secara etnis, sosial, budaya maupun agama yang diinternalisasikan dan dipraktekkan bersama-sama untuk membantu menyelesaikan masalah.

Bimbingan dan konseling yang merupakan bagian dari pilar pendidikan menjadi sarana yang tepat dalam upaya memfasilitasi para siswa memperoleh pengetahuan dan kemampuan menyelesaikan konflik/masalah secara positif. Jones (Willis, 2004) menyatakan bimbingan merupakan suatu pemberian bantuan kepada individu dalam membuat suatu pilihan kemampuan dan penyesuaian dalam kehidupannya. Kemampuan itu harus dikembangkan. Prinsip utama pengembangan

setiap individu adalah meningkatkan kemampuan, kemampuan memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri. Salah satu fungsi bimbingan adalah fungsi penyesuaian, yang berfungsi membantu individu menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal, (Nurihsan, 2006).

ASCA (*American School Counselor Association*) sebagai basis pengembangan tujuan program bimbingan dan konseling komprehensif telah membagi ranah dan ragam kompetensi dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas sebagai panduan untuk meraih perkembangan yang optimal (Rusmana, 2009).

Salah satu ranah lingkup program Bimbingan dan Konseling di sekolah adalah ranah belajar untuk hidup (*Learning to Live*). Dalam ranah ini terdapat kompetensi dasar resolusi konflik yang harus dibekali kepada peserta didik pada, siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama (CSCA, 2000). Deutsch (2000) mengatakan kemampuan untuk menyelesaikan konflik ini perlu dilakukan dengan kesadaran dan motivasi yang dikembangkan dari model kinerja yang baik sehingga akan membantu siswa memiliki kemampuan dalam penyelesaian konflik.

Beberapa penelitian menunjukkan bimbingan dan konseling di sekolah memberikan kontribusi bagi peningkatan kemampuan perilaku damai dan penyesuaian diri siswa. Ulfah, (2011) melakukan penelitian terhadap siswa Kelas X yang hasilnya membuktikan program bimbingan dan konseling pribadi sosial secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa terhadap

keragaman budaya. Begitupun juga dengan Latipun (2007) dalam hasil penelitiannya menunjukkan konseling resolusi konflik antar remaja teman sebaya efektif meningkatkan perilaku damai dikalangan remaja.

Kemampuan dalam menyelesaikan konflik khususnya di kota Ambon belum diinternalisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara penanganan pihak sekolah kepada siswa yang melakukan perkelahian dengan sesama siswa pada 16 September 2012. Wakasek Humas SMA Negeri 2 Ambon M.F Sahureka mengatakan, pihak sekolah harus mengontrol siswa-siswi mereka dengan baik, pihak sekolah mempunyai sanksi poin bahkan sampai pemecatan dan patroli merupakan solusi yang baik. (Radar Ambon 22 September 2012). Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak SMA Negeri 12 Ambon dalam menangani perkelahian antar siswa dengan memberikan sanksi bagi siswa yang memicu dan terlibat dikeluarkan dari sekolah tanpa didahului teguran. (www.beritamaluku.com, 13. Februari 2013).

Menurut Maftuh (2004), penyelesaian konflik antar pelajar diselesaikan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti guru, dan kepala sekolah karena mereka mempunyai kekuasaan di sekolah. Keterlibatan pihak otoritas dalam banyak kasus untuk memecahkan konflik dikarenakan tidak ada yang mengajari siswa tentang bagaimana menyelesaikan konflik dalam cara-cara yang konstruktif.

Crawford & Bodine (1996) meyakini siswa yang tumbuh dalam situasi di mana mereka disosialisasikan dengan kekerasan, kekerasan fisik, atau bahkan kematian tidak akan mudah untuk tunduk dengan hukuman seperti menurunkan nilai, waktu, penahanan, suspensi, atau bahkan pengusiran. Program resolusi konflik

adalah bagian penting dari alternatif-alternatif ini karena mengundang partisipasi dan mengharapkan mereka yang memilih untuk berpartisipasi merencanakan perilaku yang lebih baik dan kemudian berperilaku sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian perlu ada suatu program bimbingan bagi siswa berupa pengetahuan dan ketrampilan resolusi konflik sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap pribadi maupun lingkungannya.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti konflik sosial di Ambon awal tahun 1999, aksi pembakaran kampus Universitas Pattimura yang dilakukan oleh dua kelompok mahasiswa, perkelahian antar pelajar SMA dan SMP beberapa waktu lalu di kota Ambon, menunjukkan masyarakat maupun para peserta didik belum sepenuhnya mampu untuk menyesuaikan diri dengan baik.

Berbagai upaya dari pihak sekolah telah dilakukan, seperti melakukan pengontrolan, pemberian hukuman/sangsi kepada siswa yang melakukan perkelahian, tetapi pertanyaannya apakah tindakan seperti itu mampu membantu peserta didik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini menunjukkan bimbingan dan konseling di sekolah belum terintegrasi karena belum ada keterlibatan bimbingan dan konseling dalam penyelesaian masalah peserta didik di sekolah. Sekolah lebih mengedepankan kedisiplinan dalam penyelesaian masalah siswa.

Posisi bimbingan dan konseling sebagai bagian dari pendidikan memegang peranan penting dalam membantu siswa agar dapat memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk itu para siswa di kota Ambon perlu dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam menyelesaikan masalah/konflik secara konstruktif. Program bimbingan resolusi konflik dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merumuskan program bimbingan resolusi konflik yang dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian diri peserta didik di Sekolah Menengah Pertama di Ambon.

Tujuan khusus penelitian adalah:

1. Memperoleh gambaran tentang kemampuan penyesuaian diri peserta didik di Sekolah Menengah Pertama di kota Ambon.
2. Merumuskan program bimbingan resolusi konflik yang efektif untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri peserta didik Sekolah Menengah Pertama di kota Ambon.
3. Mengetahui keefektifan program bimbingan resolusi konflik untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri peserta didik di Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon.

D. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang diungkapkan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana profil umum kemampuan penyesuaian diri siswa di Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon.
2. Bagaimana rumusan program bimbingan resolusi konflik untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa di Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon.
3. Bagaimana efektivitas program bimbingan resolusi konflik untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa di Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis untuk memperkaya keilmuan bimbingan dan konseling, terutama dengan pengembangan program bimbingan resolusi konflik untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:
 - a. Menjadi dasar bagi para guru bimbingan dan konseling dalam penyusunan program bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian diri peserta didik di sekolah – sekolah mereka.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan diri maupun bimbingan resolusi konflik.

F. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

Asumsi yang melatarbelakangi pentingnya melakukan bimbingan resolusi konflik untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri siswa Ambon adalah sebagai berikut.

1. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri merupakan cara yang tidak sehat dalam menyelesaikan konflik. Apa yang buruk bukanlah konflik itu sendiri, tetapi kegagalan dalam menyelesaikan konflik, untuk itu individu perlu dibekali kemampuan dalam menyelesaikan konflik (Schneiders, 1960).
2. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan penyelesaian konflik secara damai dan tanpa kekerasan oleh karena itu pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara (UNESCO, 1994).
3. Resolusi konflik membantu siswa memperdalam pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan orang lain serta mengembangkan keterampilan hidup yang penting (Crawford & Bodine, 1996).
4. Model konseling resolusi konflik berlatar bimbingan komprehensif efektif untuk meningkatkan kompetensi hidup damai dan harmoni siswa (Ilfiandra, 2009).
5. Program resolusi konflik yang diintegrasikan dengan teknik bimbingan kelompok berupa sosiodrama efektif dalam menurunkan perilaku agresif dan meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah (Yavuzer, 2012).

Adapun hipotesis penelitian adalah, “Program bimbingan resolusi konflik dapat meningkatkan kemampuan penyesuaian diri peserta didik”

